

**CALON INDEPENDEN
DALAM PEMILUKADA
DI KABUPATEN PATI TAHUN 2011**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun Oleh:

**IRMA FITRIANA ULFAH
NIM 14010110400010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN DRAFT TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa draft tesis berjudul:

CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN PATI TAHUN 2011

Yang disusun oleh Irma Fitriana Ulfah, NIM 14010110400010
telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 14 Juni 2012

Pembimbing

Dr. Kushandajani

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN PATI TAHUN 2011

Yang disusun oleh Irma Fitriana Ulfah, NIM 14010110400010
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji lain

1. Dr. Reni Windiani

Dr. Kushandajani

Sekretaris Penguji

2. Dr. Hedi Pudjo Santoso

Budi Setiyono, Ph.D

Semarang, 14 Juni 2012

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Program Studi Magister Ilmu Politik

Ketua Program

Dr. Kushandajani



Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya, Irma Fitriana Ulfah menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Irma Fitriana Ulfah, S.IP

6 Juni 2012

MOTTO

- ❖ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu (Al-Baqarah: 45).
- ❖ Tiada bagimu seorang pelindung maupun penolong kecuali Allah (Al-Baqarah: 107).
- ❖ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, hendaknya kepada Allah-lah kamu berharap (Al-Insyiroh: 6-8).
- ❖ Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah dengan itu (Al-A'raf:180).
- ❖ Bertaqwalah dimana saja kamu berada dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan jelek tersebut dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik (H.R Tirmidzi).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT, Sang Pelindung dan Penolongku.
- ❖ Bapakku dan Ibuku, Mbah kakung dan Mbah putri, kakak dan adik-adikku yang tecinta.
- ❖ Seluruh keluarga besar Mbah Sukardi (Alm) dan Mbah Mustajab (Alm).
- ❖ Sahabat-sahabatku yang telah membantu dan mendukungku, serta buat teman-teman semua khususnya Magister Ilmu Politik angkatan XII UNDIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Calon Independen dalam Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2011**”. Penelitian tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Politik (S2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Dr. Kushandajani selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing pengganti yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan tesisi ini.
3. Bapak Budi Setiyono, Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing pengganti yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan tesisi ini.

4. Bapak Drs. Priyatno Harsasto, MA, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan tesis ini.
5. Ibu Dra. Rr. Hermeni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan tesis ini.
6. Ibu. Dr. Reni Windiani sebagai Dosen Penguji tesis yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan tesis ini.
7. Bapak Dr. Hedi Pudjo Santoso sebagai Dosen Penguji tesis yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Pengajar Program Studi MIP Undip yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama dibangku kuliah.
9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur independen yang telah berkenan sebagai informan dan telah memberikan informasi dan data-data untuk melengkapi penyusunan tesis ini.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pati yang telah memberikan informasi dan data-data untuk melengkapi penyusunan tesis ini.
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati dan BPS Jawa Tengah yang telah membantu melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
12. Bapakku Mardjoeki dan Ibuku Nur Chawati yang telah memberikan doa restu, nasehat, semangat, dukungan, bantuan material dan spiritual, perhatian dan kasih sayangnya.

13. Kakakku Any, Mas Suri, firha, dan adik-adikku Triana dan Nisa, serta Mbah Shofi dan Mbah Marfu'ah atas doa, nasehat, saran, dukungan, semangat, perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga Pakdhe Dr. H. Darmono SS, M.Ph, S.PGK dan Budhe Hj. Sri Sumaryati, B.Sc, Mas Diki, Mbak Icha, Diaz, Dika, Mas Dida, Mbak Ika, Vina, Beby, yang telah memberikan doa restu, semangat, dukungan, bantuan material dan spiritual, perhatian dan kasih sayang kepada penulis selama penulis kuliah sampai tesis.
15. Keluarga Pakdhe Drs. H. Muhammad Mustam, MS dan Budhe Hj. Etty Setyowati, M.AP serta mas Ofa yang telah memberikan doa restu, dukungan, bantuan material dan spiritual, perhatian dan kasih sayang kepada penulis selama penulis kuliah sampai tesis.
16. Keluarga Pakdhe Drs. H. Suharno, MM dan Hj. Endang yang telah memberikan doa restu, dukungan, perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
17. Seluruh Keluarga Besar Mbah Sukardi (Alm) dan Mbah Mustajab (Alm) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada pakde budhe, sepupu, keponakan, cucu, terimakasih atas doanya.
18. Buat sahabatku Niken Dwi Wijayanti, S.IP dan Dian Armanitha Majid, S.IP, MH yang telah memberikan dukungan, semangat, nasehat, bantuan dan atas kebersamaan kalian saat susah maupun senang. Kalian merupakan sahabat terindah yang pernah kumiliki, *jazakumullah khairan katsir*. Terimakasih telah membuat warna-warni di Kota Semarang penuh kenangan ini. Dan juga buat

Bagus Debta Nove, S.IP dan Rizki Susotya Murti, S.IP terima kasih atas *supportnya*.

19. Buat habibi_ku terima kasih atas bantuan, spirit dan do'anya. InsyaAllah wisuda sama-sama.
20. MIP Lovers Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Politik angkatan XII, Ocha, Mbak Ema, Bu Vero, Mas Eko, Pak Ulin, Stella, Nia, Viel dan seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, spesial buat Mbak Deasy terima kasih atas semangat, saran, nasehat dan kebersamaan selama ini.
21. Buat Mbak Aya, Mas Toha, Mas Toyo dan Mas Apri terima kasih perhatiannya,
22. Sahabat-sahabatku Ais, Mbak Nash, Mbak Ul, Ifa, Mbak wit, Umi, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 14 Juni 2012

Penulis,

(Irma Fitriana Ulfah)

NIM : 14010110400010

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN DRAFT TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN TESIS	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Pembatasan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	
2.1. Penelitian Terdahulu	11

2.2. Telaah Pustaka	14
2.2.1. Pemilukada	14
2.2.2. Calon Independen	19
2.2.3. Komunikasi Politik dan Marketing Politik	22
2.2.4. <i>Candidate Personality</i>	26
2.2.5. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial.....	30
2.2.6. <i>Party Oriented Voters</i>	33
2.3. Operasionalisasi Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Tipe Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Metode Penentuan Informan.....	40
3.6. Teknik Analisis Data	41
3.7. Sistematika Penulisan	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA	
4.1. Gambaran Umum dan Deskripsi Wilayah Kabupaten Pati.....	44
4.1.1. Letak Geografis.....	44
4.1.2. Pemerintahan.....	46
4.1.3. Kondisi Demografis	47
4.2. Peta Kekuatan Politik Kabupaten Pati	55
4.2.1. Pemilu Legislatif	55

4.2.2. Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2006	57
4.2.3. Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011	57
4.3. Calon Independen Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 ..	60
4.3.1. Tahapan Pemilukada	61
4.3.1.1. Pencalonan	61
4.3.1.2. Pendaftaran Pasangan Calon Independen	65
4.3.2. Kekalahan Calon Independen	66
4.3.3. <i>Candidate Personality</i>	67
4.3.4. Kampanye	85
4.3.6. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial.....	104
4.3.7. <i>Party Oriented Voters</i>	111
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	121
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.	Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011 5
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Pati Tiap Kecamatan Menurut Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah Tahun 2010 (Ha)..... 45
Tabel 4.2	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan Banyaknya Desa / Kelurahan Tahun 2010..... 46
Tabel 4.3	Banyaknya Penduduk Kelompok Umur di Kabupaten Pati dan Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Keadaan Tahun 2010 49
Tabel 4.4	Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Pati 50
Tabel 4.5	Banyaknya Pekerja Menurut Pendidikan dan Lapangan Usaha di Kabupaten Pati Tahun 2010..... 51
Tabel 4.6	Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Pati Tahun 2005-2010 (Ton) 52
Tabel 4.7	Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Pati 55
Tabel 4.8	Rekapitulasi Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pemilu Legislatif di Kabupaten Pati..... 56
Tabel 4.9	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati Tahun 2006..... 57

Tabel 4.10	Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan TPS Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2011	58
Tabel 4.11	Hasil Perolehan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011	59
Tabel 4.12	Penyerahan Syarat Dukungan Calon Independen.....	64
Tabel 4.13	Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011	87
Tabel 4.14	Jadwal Kampanye Non Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011	88
Tabel 4.15	Susunan Tim Sukses Pasangan HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT - Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM.....	89
Tabel 4.16	Susunan Tim Sukses Pasangan Ir. H. Sri Merditomo, MM - H. Karsidi, SH.....	95
Tabel 4.17	Susunan Tim Sukses Pasangan Sri Susahid, SH, MH - Hasan, SH., MH	99
Tabel 4.18	Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Pati	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Pasangan Calon Independen	83
Gambar 4.2 Baliho	92
Gambar 4.3 Baliho	97
Gambar 4.4 Banner	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup Penulis
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011
- Lampiran 4 : Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011
- Lampiran 5 : Ijin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian KPUD Kabupaten Pati
- Lampiran 8 : Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Lampiran 9 : Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011
- Lampiran 10 : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011.
- Lampiran 11 : Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011.
- Lampiran 12 : Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas SK Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011.

Lampiran 13 : Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di
Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

ABSTRACT

The existence of independent candidate on Local Election upcoming gives new nuance in democracy. Hopefully, with the presence of independent candidate in Local Election could reduce conflict and quarrel that usually triggered by unsatisfactory toward Local election that assumed deceiving society's aspiration. Nowadays, society are much more clever to ascertain their political preferences. It was the consequences from enhanced civil education. Nevertheless, in reality independent candidate defeated in many areas such as occurs in Pati's regency.

This research using qualitative descriptive method to explains causing factors of failure independent candidates in Local Election in Pati Regency 2011. The analysis was done by using primary data and secondary data obtained through review of documents and in-depth interviews from reliable sources.

Results of research shows that personality of all independent candidates were imposing almost as much the same and none of them conspicuous, so the electability's level relative submissive. Candidate's personality differentiated through out political marketing strategy of promotion and voters segmentation didn't have any influence toward the acquisition of community support. Although independent candidates has already arranged network systems and its supporters by establishing success team in order to gain Local Election. Yet, facts on field shows that network systems and supporters weren't effective. Money distribution action to some of voters by candidates as the way to drove away voters giving his/her voice also didn't have positive influences on increasing the amount candidates voices because there was political game assumption by candidates success team itself so that the money was not delivered to society.

The recommendation that could be suggested to independent candidates, first of all it is crucial to improve image of independent candidates, especially candidates as one of the factors that influence success in the election. Second, it is building a special team to evaluate the performance of a successful team in detail to see the development of mass support, to network and support system in the form of a successful team can run effectively and efficiently to win the Local Election.

Keywords: independent candidates, Local Election

ABSTRAKSI

Keberadaan calon independen dalam Pemiluakada ke depan memberi nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi. Diharapkan dengan kehadiran calon independen dalam Pemiluakada dapat mengurangi konflik dan sengketa yang umumnya dipicu ketidakpuasan terhadap Pemiluakada yang dianggap mencederai aspirasi masyarakat. Kini, masyarakat semakin pandai dalam menentukan preferensi politiknya. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya pendidikan politik masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya calon independen tetap mengalami kekalahan di berbagai tempat seperti yang terjadi di kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen dalam Pemiluakada di Kabupaten Pati tahun 2011. Sedangkan, analisis dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian dokumen diikuti teknik wawancara mendalam dari sumber- sumber yang dapat diandalkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa personalitas kandidat calon independen terkesan hampir sama dan tidak menonjol, sehingga tingkat elektabilitas calon independen relatif rendah. Personalitas kandidat yang dideferensiasikan melalui marketing politik yakni dalam bentuk promosi dan segmentasi pemilih tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap perolehan dukungan masyarakat. Padahal, calon independen telah menyusun sistem jaringan dan pendukung dalam bentuk tim sukses untuk memenangkan pemiluakada. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem jaringan dan pendukung tidak efektif. Tindakan pemberian uang kepada sejumlah pemilih oleh kandidat sebagai upaya menggiring pemilih untuk memberikan hak suaranya tidak berpengaruh positif pada peningkatan jumlah suara para kandidat karena adanya indikasi permainan politik dari tim sukses itu sendiri, sehingga uang tidak sampai ke masyarakat.

Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada calon independen yakni pertama, memperkuat *image* calon khususnya pasangan calon independen sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemilihan. Kedua, membuat tim khusus untuk mengevaluasi kinerja tim sukses yang secara detail melihat perkembangan dukungan massa, agar sistem jaringan dan pendukung dalam bentuk tim sukses dapat berjalan efektif dan efisien untuk memenangkan Pemiluakada.

Kata kunci: calon independen, Pemiluakada

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) diyakini sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Pemilu¹ merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilukada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada merupakan jalan politik yang terbaik yang membuat semarak praktik demokrasi lokal. Hal ini sebagai langkah awal bagi masyarakat lokal dalam menata pemerintahan yang dapat dipercaya karena memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.² Pemilukada harus disiapkan dengan baik, sehingga ke depan proses pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung itu

¹ Wiwi. <http://wiwi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antara-pemilu-dengan-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat/>. 20 Juli 2010.

² Kushandajani. *Pilkada dan Demokratisasi di Daerah*. FORUM. Vol. 36 No.2. Juni. 2008. Halaman 2.

lebih bermakna dan mempunyai kontribusi positif terhadap desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal.

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Pelaksanaan Pemilukada bertujuan untuk menguatkan legitimasi politik penguasa di daerah.³ Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri, sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat dan mereka juga wajib bertanggungjawab kepada rakyat. Pemilukada juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut peluang melalui jalur independen (perseorangan) bagi masyarakat umum menjadi kepala daerah semakin besar dan terbuka, karena calon kepala daerah tidak lagi harus dari partai politik. Calon independen harus mempunyai kompetensi yang baik, sehingga jika terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin.

Keberadaan calon independen dalam Pemilukada kedepan akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi. Diharapkan dengan kehadiran calon independen dalam Pemilukada dapat mengurangi konflik dan

³ Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 126.

sengketa yang umumnya diakibatkan ketidakpuasan terhadap Pemilukada yang dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Kini masyarakat semakin pandai dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya pendidikan politik masyarakat.

Di sisi lain, calon independen yang akan maju sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam menjalankan kebijakan sebagai kepala daerah ada kemungkinan menemui hambatan karena tidak didukung penuh oleh partai-partai yang mempunyai keterwakilan di legislatif. Meskipun bertarung sendirian tanpa dukungan partai politik, pada akhirnya pimpinan daerah yang merupakan calon independen tetap harus mengadakan kerja sama dengan fraksi yang berkuasa, dimana kebijakan pemerintah daerah tetap diawasi oleh DPRD.

Tahun 2010 terdapat 17 Pemilukada di Jawa Tengah, dimana ada 6 Kabupaten yang terdapat pasangan calon independen yaitu Kabupaten Kendal (1 pasangan), Magelang (1 pasangan), Wonosobo (1 pasangan), Purworejo (2 pasangan), Rembang (2 pasangan) dan Kota Pekalongan (1 pasangan). Tahun 2011 dari 8 Pemilukada terdapat 4 Kabupaten yang ada pasangan calon independen antara lain Kabupaten Pekalongan (1 pasangan), Kabupaten Sragen (2 pasangan), Kabupaten Banjarnegara (1 pasangan), dan Kabupaten Pati (3 pasangan).⁴ Sebanyak 25 Pemilukada di Jawa Tengah yang telah terselenggara pada tahun 2010-2011 tidak ada satupun calon independen yang berhasil memenangkan Pemilukada.

⁴ Kpu-jatengprov.go.id. di akses tanggal 23 Desember 2011.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, calon independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutny tetap ada peluang bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figur yang diusung.⁵ Sedangkan pengamat politik Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana menyatakan bahwa pencalonan melalui jalur independen dinilai lebih steril dari hutang politik kepada partai politik ketimbang calon yang diusung lewat partai politik. Dengan begitu, jika kelak calon independen menjabat kepala daerah, potensi korupsi untuk membayar hutang budi kepada partai politik dapat dihilangkan.⁶

Berdasarkan temuan survei nasional LSI tahun 2007 menyebutkan bahwa secara umum warga mendukung prinsip dimana setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum baik itu pemilihan presiden maupun kepala daerah. Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, wali kota dan bupati tidak hanya oleh partai politik tetapi juga boleh oleh kelompok-kelompok di luar partai. Pencalonan hanya oleh partai politik dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga. Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini memperkuat dukungan terhadap gagasan calon independen. Rendahnya kepercayaan publik pada partai politik dapat pula menjadi faktor meningkatnya dukungan terhadap calon independen.⁷

⁵ Riana Afifah dan Agus Mulyadi. Rabu 20 Juli 2011. 15:35 WIB. <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.Independen.Angin.Segar>

⁶ <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/82042>. Sabtu, 28 Januari 2012. 06:30:40 WIB

⁷ Afifah. Op Cit

Keberadaan calon independen semakin memperoleh pengakuan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2008. Namun munculnya calon independen yang dapat dijadikan tolak ukur peningkatan sebuah demokrasi tidak serta merta mendapat hasil positif. Sudah banyak calon independen yang maju dalam pertarungan pemilihan umum baik itu bupati maupun walikota. Namun sejauh ini jalur independen seringkali gagal ditetapkan sebagai calon karena tidak mampu memenuhi syarat dukungan pemilih dan walaupun lolos sebagai calon yang bersangkutan gagal memperoleh suara pemilih.⁸ Kondisi seperti inilah yang terjadi di Kabupaten Pati.

Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 23 Juli 2011 diikuti oleh enam pasangan calon. Berikut adalah tabel tentang pasangan calon kepala daerah dan perolehan suaranya.

Tabel 1.1
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan suara	Prosentase	Jalur
1	Slamet Warsito-Sri Mulyani	118.059	16,39%.	Independen
2	Sunarwi-Tedjo Pramono	159.268	22,11%	PDIP
3	Sri Merditomo-Karsidi	118.625	16,47%,	Independen
4	Sri Susahid-Hasan	5.165	0,72%	Independen
5	Haryanto-Budiyono	204.606	28,40%	PKS, PKB, HANURA, GERINDRA, PPP, PKPB, dan PPI
6	Kartina Sukawati-Supeno	114.635	15,91%	P. Demokrat

Sumber: Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2011.

⁸ Fitriyah. *Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan Untuk Pilkada Langsung Berkualitas*. *Politika Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 2 Nomor 1. April 2011. Halaman 46.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemilukada Kabupaten Pati diikuti oleh 6 pasangan calon, 2 pasangan berasal dari jalur partai politik dan 1 pasangan dari gabungan partai politik serta 3 pasangan lagi dari jalur independen.

Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 pasangan Haryanto-Budiyono memperoleh suara terbanyak yaitu 204.606 suara atau 28,40%, masih kurang dari 30% jumlah total suara sebanyak 737.742. Peraih peringkat kedua merupakan pasangan Sunarwi-Tedjo Pramono meraih suara sebanyak 159.268 suara atau 22,11%. Hasil perolehan suara terbanyak masih belum mencapai 30% sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang. Semua pasangan calon independen yang berani tampil dalam Pemilukada Kabupaten Pati tidak ada satupun yang mampu memenuhi target kuota suara. Ketiga pasangan calon independen dalam Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 antara lain: Sri Merditomo-Karsidi, Slamet Warsito-Sri Mulyani, dan Sri Susahid-Hasan. Hasil perolehan suara menunjukkan Sri Merditomo-Karsidi menempati urutan ketiga dengan suara sebanyak 118.625 suara atau 16,47%, disusul pasangan Slamet Warsito-Sri Mulyani menempati urutan keempat dengan suara sebanyak 118.059 suara atau 16,39% dan pasangan Sri Susahid-Hasan harus puas menduduki urutan terakhir dengan dukungan 5.165 suara atau 0,72%.

Menjadi suatu hal menarik ketika Pemilukada di Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatalan ini disebabkan oleh konflik internal PDIP Kabupaten Pati, dimana pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni Imam Suroso-Sujoko dan Sunarwi-Tejo Pramono berseteru sejak tahap pengajuan rekomendasi di DPP

PDIP hingga proses pendaftaran di KPU. Namun, pada akhirnya Sunarwi-Tejo Pramono yang maju dalam Pemilukada tersebut. Sunarwi melakukan penggantian pasangan calon pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon di KPU. Sunarwi memanfaatkan celah aturan karena posisinya sebagai pengurus DPC. Celah yang dimanfaatkan adalah pasal 42 huruf f Keputusan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, pasangan calon dapat diajukan pengantiannya oleh pimpinan partai selama masih dalam masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati bahwa MK mengabulkan permohonan Imam Suroso-Sujoko, bakal calon bupati dan wakil bupati yang direkomendasikan DPP PDI-P. Keputusan MK itu final dan mengikat, maka KPU Kabupaten Pati harus mengulang penyelenggaraan Pemilukada serta mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sunarwi-Tejo Pramono dan mengganti pasangan tersebut dengan Imam Suroso-Sujoko.⁹

Selain Pemilukada yang dibatalkan, hal unik lainnya adalah ketika ada tiga pasangan calon independen yang berani tampil dan bertarung dalam Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 dan merupakan pertama kalinya pasangan dari jalur independen tampil sepanjang sejarah Pemilukada Kabupaten Pati. Selain dari sisi jumlah calon independen juga jumlah suara yang diperolehnya. Perolehan suara calon independen mengungguli perolehan suara Partai Demokrat. Pasangan

⁹ Rexona Ari. 27 Juni 2011. 04:27. <http://pilkada2011.blogspot.com/2011/06/konflik-internal-pdip-siapa-diuntungkan.html>

Kartina Sukawati-Supeno yang diusung oleh Partai Demokrat hanya mendapat 15,91% suara. Perolehan suara ini dikalahkan oleh pasangan calon Kepala Daerah dari jalur independen yaitu pasangan Sri Merditomo-Karsidi yang mendapat 16,47% suara dan pasangan Slamet Warsito-Sri Mulyani yang mendapat 16,39%. Hal ini menunjukkan bahwa calon independen ternyata mampu mengalahkan salah satu pasangan yang didukung oleh partai politik. Namun, hasil akhir tetap menunjukkan bahwa calon independen gagal memenangkan proses perebutan kekuasaan.

Slamet Warsito tampil yang ketiga kalinya sebagai calon bupati. Tahun 2001 menjadi Calon Bupati berpasangan dengan KH. Asmudi Syadzali yang diusung oleh PKB. Pemilihan Bupati tahun 2006 Slamet tampil sebagai Calon Bupati dari PKS, PBB, dan PPP, berpasangan dengan Anik Syahuri dan tahun 2011 tampil sebagai Calon Bupati dari perseorangan atau non-partai. Fenomena tingginya hasrat politik maju sebagai calon Kepala Daerah ketiga kalinya dengan pergantian pasangan secara instan.

Sri Susahid-Hasan dan Sri Merditomo-Karsidi juga maju sebagai calon bupati melalui jalur independen. Sri Susahid adalah pensiunan PNS RSU Soewondo Pati dan Sri Merditomo mantan Sekda Kabupaten Pati.

Calon independen baru muncul pertama kali di Kabupaten Pati sehingga terkesan kurang populer di mata masyarakat. Oleh karena itu, dengan dibukanya peluang calon independen harus diikuti dengan langkah-langkah konkret agar keberadaan calon independen tersebut mempunyai posisi tawar yang sama dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Calon independen tidak mempunyai

ideologi dan tidak mempunyai basis massa yang kuat karena tidak didukung oleh partai politik, sehingga dapat dilihat bahwa calon independen yang berani tampil khususnya dalam PemiluKada harus lebih banyak didukung dari beberapa faktor seperti mempunyai citra yang kuat dan ditunjang dari faktor ekonomi.

1.2. Perumusan Masalah

Agar suatu penelitian itu jelas dan tidak meleset dari jalur yang ada, maka perlu diadakan suatu penuntun atau pedoman. Hal ini tak lain adalah merumuskan masalah secara benar dan jelas. Perumusan masalah diperlukan dengan maksud untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai hakikat dari suatu masalah yang ada, sehingga akan lebih mudah memahaminya.

Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Mengapa calon independen dalam PemiluKada Kabupaten Pati tahun 2011 mengalami kekalahan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen dalam memperoleh dukungan pada PemiluKada di Kabupaten Pati tahun 2011.

1.4. Pembatasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini mencakup pembatasan lokasi dan waktu. Pembatasan lokasi dalam hal ini penulis memfokuskan keberadaan calon

independen di Kabupaten Pati, sedangkan pembatasan waktu yaitu hanya pada Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dapat pula dijabarkan bahwa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

- a) Pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu politik, khususnya dalam kajian calon independen dalam Pemilukada
- b) Pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat calon independen dalam dalam Pemilukada.

2. Kegunaan Praktis:

- a) Pengkajian ini diupayakan dapat digunakan sebagai acuan calon independen dalam melakukan perencanaan pemenangan dalam Pemilukada.
- b) Pengkajian ini dapat dijadikan referensi oleh calon independen untuk meningkatkan elektabilitasnya dikemudian hari.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muluk Lubis bahwa calon independen dalam pemilihan kepala daerah lahir salah satunya disebabkan oleh keinginan masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik.¹⁰ Pelaksanaan calon independen dalam Pemilukada di beberapa daerah telah terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang calon independen. Namun jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh oleh calon independen, masih jauh tertinggal dengan hasil perolehan calon dari partai politik dalam kemenangan Pemilukada.

Legalis Mahaaditya Syahadat¹¹ dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas calon independen dalam Pemilukada Lampung tahun 2008 adalah fenomena masyarakat yang lebih mempercayai calon independen, waktu pelaksanaan masa kampanye yang terbatas, faktor figur (ketokohan) dalam bursa pemilihan Pemilukada, pentingnya kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik.

¹⁰ Abdul Muluk Lubis. 2010. *Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. Medan: USU.

¹¹ Legalis Mahaaditya Syahadat. 2010. *Analisis Keikutsertaan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008*. Skripsi. Yogyakarta: UMY.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Muharini menyebutkan bahwa marketing politik bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pemilihan akan tetapi marketing politik dapat menjadi *tools* untuk menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.¹²

Marketing politik mempunyai peranan yang besar dalam kemenangan Pemilukada. Hal ini dikarenakan proses marketing yang dilakukan oleh partai atau calon Bupati membantu mengenal masyarakat yang diwakilinya secara lebih baik, sehingga melalui proses marketing politik terjadi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Marketing politik akan membantu kontestan atau partai politik untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara komprehensif melalui variabel-variabel dalam marketing politik yang pada akhirnya akan mampu meraup dukungan yang cukup besar.¹³

J. Scott Armstrong, Kesten C. Green, Randall J. Jones, Jr. dan Malcom Wright mengadakan penelitian pada tahun 2008 yang menemukan bahwa ketika pemilih juga melakukan penilaian terhadap kompetensi politisi, mereka juga terpengaruh pada penampilan wajah.¹⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Amy King dan Andrew Leigh pada tahun 2005 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kemenarikan politisi dan jumlah pemilih. Riset tersebut

¹² Dyah Muharini. 2009. *Marketing Politik Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Penelitian pada PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode 2008-2013*. Tesis. Semarang: UNDIP. Halaman 138.

¹³ Ibid.

¹⁴ Silih Agung Wasesa. 2011. *Politikcal Branding and Public Relation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 291.

menyimpulkan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat yang penampilannya menarik.¹⁵ Hal yang sama terjadi dalam Pemilukada DKI Jakarta yaitu kemenangan pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto disebabkan oleh kuatnya faktor figur, dimana pasangan ini merupakan kombinasi sipil-militer yang dianggap ideal untuk menjalankan roda pemerintahan.¹⁶ Faktor pertama yang mempengaruhi peluang kandidat untuk menang Pemilu di Eropa adalah personalitas, sedangkan di Amerika Serikat faktor personalitas menempati urutan kedua yang mempengaruhi kesuksesan kampanye.¹⁷ Berdasarkan penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas membuktikan bahwa figur, personalitas merupakan salah satu faktor penting untuk menarik dukungan masyarakat.

Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) Fisip Undip mengadakan penelitian di 12 Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilukada, ternyata ada empat faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang calon kepala daerah, antara lain: figur kuat, jaringan luas, dan dana yang melimpah.¹⁸ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah menjelaskan bahwa perolehan suara yang diperoleh pasangan Bibit-Rustri dalam Pilgub Jateng tidak terlepas dari figur dan popularitas calon. Bibit-Rustri

¹⁵ Ibid. Halaman 301.

¹⁶ Ellwein, Warsito, Sigit Pranawa, Yan Kurniawan, Eko Bambang Subiantoro. 2010. *Memperbesar Peluang Calon Memenangkan Pilkada: Profil Calon, Mesin Pemenangan dan Perilaku Pemilih*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit. Halaman 92.

¹⁷ Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 75.

¹⁸ Susilo Utomo. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/02/03/97664/Menu-Baru-Calon-Perseorangan>. 3 Februari 2010.

merupakan figur yang dianggap mampu membawa perubahan bagi Jawa Tengah.¹⁹

Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa faktor penentu kemenangan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih salah satunya disebabkan oleh peran figur pasangan calon, dimana keberhasilan Rustriningsih dalam membangun dan memajukan Kabupaten Kebumen selama ia menjabat sebagai Bupati dikombinasikan dengan figur Bibit Waluyo sebagai jenderal yang sederhana dan dekat dengan *wong cilik* telah menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada pasangan tersebut untuk membangun dan memajukan Jawa Tengah pasca Pemilu 2008.²⁰

Merujuk penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekalahan calon independen dalam Pemilu di Kabupaten Pati tahun 2011.

2.2. Telaah Pustaka

2.2.1. Pemilu 2008

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Siti Zubaidah. 2010. *Strategi Pemenangan Pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008*. Tesis. Semarang: UNDIP.

²⁰ Ellwein, Warsito, Sigit Pranawa, Yan Kurniawan, Eko Bambang Subiantoro. *Op Cit*.

Sedangkan menurut PP No. 49/2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menyebutkan bahwa Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilukada seperti halnya pemilihan umum, merupakan arena politik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara. Bagaimanapun Pemilukada merupakan proses pemilihan dengan model demokratis dibandingkan dengan model yang lain.

Pemilukada perlu dilakukan secara langsung, dikarenakan:²¹

- a) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat

Warga masyarakat berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

- b) Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD

Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.

²¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Halaman. 53.

- c) Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, berarti kedudukan DPRD berada diatas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

- d) Undang-undang. No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD

Dalam pasal 62 UU No. 22 Tahun 2003, kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dicabut. Kewenangan yang ada pada DPRD, adalah mengusulkan pengangkatan dan penghentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

- e) Mencegah terjadinya politik uang

Masalah politik uang dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, kemungkinan terjadi politik uang ini dapat dicegah, atau setidaknya – tidaknya dapat dikurangi. Apabila masih ada pihak – pihak yang ingin melakukannya, mereka akan berhadapan dengan para pemilih yang jumlahnya cukup banyak.

Hal-hal tersebut diatas merupakan pentingnya Pemilukada langsung menurut Rozali Abdullah, sedangkan menurut Abdul Djalil dalam Ardiantoro, (1999: 33-35), ada beberapa keunggulan pelaksanaan Pemilukada, antara lain:

1. Memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif.
2. Keterlibatan rakyat dalam Pemilu adalah wujud partisipasi politik rakyat.
3. Sebagai wahana formal membentuk tatanan negara dan masyarakat menuju ke tatanan yang lebih baik.
4. Dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada yang *free and fair* sangat penting bagi berjalannya demokrasi suatu bangsa, antara lain:²²

- 1) Melalui Pemilukada yang *free and fair* memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai.
- 2) Sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik secara terbuka, sehingga dengan Pilkada yang *free and fair* dapat menciptakan pelembagaan konflik.

Catatan penting dalam rangka mewujudkan penguatan hingga pemberdayaan demokrasi ditingkat lokal dalam proses pemilihan atau rekrutmen, para wakil rakyat mendapat mandat politik dari warga masyarakatnya (Pemilukada Langsung), diantaranya: *Pertama*, dengan Pemilukada langsung penguatan demokratisasi ditingkat lokal dapat terwujud, khususnya yang

²² Muhammad Asfar. 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka. Halaman 8.

berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik. *Kedua*, dengan Pemilukada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal (*accountability*). *Ketiga*, apabila *local accountability* berhasil diwujudkan, maka optimalisasi equilibrium *check and balances* antara lembaga-lembaga negara (terutama antara eksekutif dan legislatif) dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal. *Keempat*, melalui Pemilukada langsung peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul.²³ Banyak ahli masing-masing menyebutkan keunggulan, kelebihan sistem Pemilukada langsung. Begitu juga dengan Sutoro Eko mempunyai pendapat lain lagi mengenai keunggulan Pemilukada langsung.

Menurut Sutoro Eko ada beberapa keunggulan Pemilukada dengan model demokratis secara langsung. *Pertama*, Pemilukada memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas, bukan sekadar melibatkan segelintir orang secara oligarkhis dalam DPRD. *Kedua*, proses partisipatif memungkinkan terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak sosial (visi dan misi kandidat) bukan hanya sebagai obral janji melainkan sebagai arena pembelajaran untuk memupuk akuntabilitas pemerintah lokal kepada masyarakat. *Ketiga*, Pemilukada memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan

²³ Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 9.

calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas serta *legitimate* di mata masyarakat.²⁴

Harapan-harapan ideal seperti itu dapat diwujudkan bila ditopang oleh sejumlah prakondisi. *Pertama*, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. *Kedua*, masyarakat mempunyai budaya politik yang demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif. *Ketiga*, massa pemilih yang terdidik, *well-informed* dan rasional-kritis. *Keempat*, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan masyarakat.²⁵

Kualitas sistem Pemilu dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu *pertama*, penyelenggara Pemilu. KPU dan Bawaslu harus independen. Keduanya jangan sampai bekerja berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. *Kedua*, masih banyak peraturan Pemilu yang tumpang tindih sehingga harus segera diperbaiki.²⁶

Pemilu diikuti oleh partai politik maupun gabungan partai politik serta melalui jalur perseorangan (independen), sehingga akan dibahas mengenai calon independen secara lebih komprehensif.

2.2.2. Calon Independen

²⁴ Sutoro Eko, *Pilkada secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi*, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004.

²⁵ Ibid.

²⁶ Susie Berindra dan A Tomy Trinugroho, (23 Desember 2010), *Sistem Pemilu Masih Mencari Bentuk*, Kompas, Halaman 8.

Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang ini.²⁷

Berdasarkan Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon independen untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Pasangan calon independen dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁸

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Kran demokrasi memberikan peluang kepada calon independen untuk ikut dalam Pemilukada. Peluang calon independen dalam Pemilukada maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²⁹

²⁷ UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

²⁸ Ibid.

²⁹ J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 191.

- a) Calon perseorangan harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga sistem kepartaian).
- b) Calon perseorangan harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus terlembaga dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem politik yang ada.
- c) Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan.

Segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan adanya peluang kepada calon independen. Kekurangan jalur independen antara lain.³⁰

- 1) Bagaimanapun partai tetap menjadi pilar utama demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Partai didesain untuk memainkan peran dalam setiap pengambilan kebijakan publik termasuk rekrutmen kepemimpinan.
- 2) Situasi *less democratic* terlalu besar beban dan konsekuensi yang harus ditanggung calon independen. Beban moral dan finansial yang harus dikeluarkan calon independen untuk memenangkan Pemilu akan sangat besar, seperti untuk biaya kampanye dan operasional lain.

Selain kekurangan diatas, menurut Girindra Sadino Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ada beberapa faktor peluang calon perseorangan dalam Pemilu masih kecil, antara lain: *pertama*, tidak memiliki

³⁰ Joko P. Prihatmoko. 2008. *Mendemokraskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 284.

mesin politik terorganisasi pemenang sehingga sulit berkompetisi dengan calon yang didukung partai politik. *Kedua*, harus diakui bila pasangan calon independen masih kesulitan dalam memobilisasi sumber daya politiknya, khususnya dalam memobilisasi dan mendapatkan dukungan finansial.³¹

Melihat peluang calon independen dalam PemiluKada masih kecil untuk menang, dimana calon independen tidak mempunyai basis massa yang kuat yaitu tidak didukung oleh partai politik, maka untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen harus lebih menonjolkan pada *candidate personality*, sumber daya sosial ekonomi serta perlunya melihat *party oriented voters*. Untuk melihat ketiga variabel tersebut dapat dilihat dari teori mengenai komunikasi politik dan marketing politik.

2.2.3. Komunikasi Politik dan Marketing politik

Menurut Richards Fagen komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang terdapat dalam suatu sistem politik yang mempunyai dampak secara aktual dan potensial.³² Sedangkan menurut Maswadi Rauf komunikasi politik merupakan pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkait kekuasaan, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.³³

Berdasarkan strategi komunikasi politik, *marketing* politik mengajarkan bagaimana partai politik dapat mendiferensiasikan produk dan *image* politiknya,

³¹ <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/67441>

³² Riswandi, 2009, *Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 4.

³³ Rochajat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung: Mandar Maju, 2006, Halaman 2.

sehingga masyarakat luas dapat mengenali identitas masing-masing partai politik dan kontestan perseorangan.³⁴

Menurut Bagozzi, marketing itu sendiri adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran antara dua pihak atau lebih. Pertukaran terdapat proses hubungan (*relation*) yang memungkinkan interaksi, dimana dalam prosesnya masing-masing pihak ingin memaksimalkan dan menjamin bahwa kepentingannya sendiri akan terpenuhi.³⁵

Political marketing adalah serangkaian aktivitas strategis yang berdimensi baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk meyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. *Political marketing* bertitik tolak dari konsep makna (*meaning*) yaitu *political meaning* yang dihasilkan oleh stimulus politik berupa komunikasi politik baik lisan maupun non lisan, baik langsung maupun melalui perantara. Makna (*meaning*) oleh Peter dan Oslon diberi batasan yakni interpretasi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari lingkungannya.³⁶

Political marketing berhubungan dengan strategi komunikasi politik yang memberikan *positioning* tentang *image personality* yang ditawarkan sebagai salah satu nilai utama untuk mencari dukungan masyarakat.

Brian McNair menjelaskan:

“Only three ways to assess the effects of political communication on attitudes and behaviour. The first is to ask people how they have responded to specific messages, and then collate their responses into statistically significant aggregates, usually in the form of public opinion polls. Second, one may observe voting behaviour, relating this to the

³⁴ Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 198.

³⁵ Ibid. Halaman 137.

³⁶ Adman Nursal. *Op Cit*. Halaman 23.

communication strategies of the contestants in apolitical campaign. Third, one may conduct experiments intended to isolate the effects of particular elements of the communication process".³⁷ (Hanya ada tiga cara untuk menilai efek dari komunikasi politik terhadap sikap dan perilaku. Yang pertama adalah meminta orang-orang bagaimana mereka harus menanggapi pesan-pesan tertentu, dan kemudian menyusun tanggapan mereka secara keseluruhan dan statistik yang signifikan, hal ini biasanya dalam bentuk jajak pendapat publik. Kedua, seseorang dapat mengamati perilaku pemilih, hal ini berkaitan untuk strategi komunikasi dari kontestan dalam kampanye yang bersifat apolitis. Ketiga, seseorang dapat melakukan percobaan yang dimaksudkan untuk mengisolasi efek dari elemen-elemen tertentu dari proses komunikasi.)

"As Bruce notes, all effective communications strategies contain what is called a positioning statement, a clear analysis of what to brand, (or company, person, political party, etc) is for who it is for, and why anyone should be interested in choosing it".³⁸ (Bruce menjelaskan semua strategi komunikasi yang efektif terdiri dari apa yang disebut dengan penempatan pernyataan, sebuah analisis yang jelas tentang apa yang harus di kampanyekan atau dipublikasikan (misalnya perusahaan, orang, partai politik, dll) dengan tujuan untuk siapa kampanye atau publikasi itu dan apa sisi kemanfaatannya atau keunggulannya, serta apa penyebabnya sehingga setiap orang menjadi tertarik untuk memilihnya).

Melalui strategi komunikasi politik baik itu partai politik maupun calon perseorangan dapat memobilisasi pemilih pada waktu Pemilu, sehingga masyarakat menjatuhkan pilihannya berdasarkan segala sesuatu yang telah didengar, dilihat ataupun dirasakan.

"Among the experiments conducted into the efficacy of political communication at this level is Rosenberg and McCafferty's study of the extent to which "public relations experts can manipulate the public's impression of a political candidate (1987, p. 31). Their concern in this research was with non-verbal aspects of communication, or the candidate's image defined in narrow, physical terms. As they put it, we are interested in exploring whether or not it is possible to manipulate an individual's appearance in a way that affects both voters judgments of the

³⁷ Brian McNair. 2003. *An Introduction To Political Communication*. New York: Routledge. Halaman 32.

³⁸ Ibid. Halaman 150.

candidate and the choice they make at the ballot box (ibid)".³⁹ (Di antara percobaan yang dilakukan dalam keampuhan komunikasi politik pada tingkat ini adalah penelitian Rosenberg dan McCafferty dari sejauh mana public relation dapat memanipulasi kesan publik terhadap seorang kandidat politik (1987, hal 31). Keprihatinan mereka dalam penelitian ini adalah dengan aspek komunikasi non-verbal, atau gambar kandidat didefinisikan dalam arti yang sederhana, itu istilah fisiknya. Ketika mereka mengatakan, kami tertarik untuk mengeksplorasi apakah itu tidak mungkin atau mungkin adalah untuk memanipulasi penampilan individu dengan cara yang mempengaruhi kedua penilaian calon pemilih dan pilihan yang mereka buat pada kotak suara).

*"Research conducted in Germany by Kepplinger and Dombach indicated that certain camera angles, such as filming at eye level, produced a more favourable audience response to a politician than others. They concluded that camera angles influence perception, particularly among a politician's supporters. (1987, p. 71)".*⁴⁰ (Penelitian yang dilakukan di Jerman oleh Kepplinger dan Dombach menunjukkan bahwa kecantikan kamera tertentu, seperti film yang tampak pada pandangan mata, menghasilkan respon audiens yang lebih menguntungkan bagi politikus daripada yang lain. Mereka menyimpulkan bahwa sudut kamera mempengaruhi persepsi, khususnya di kalangan pendukung seorang politisi).

*"Some research has been concerned with the specific effects of different media. Scott Keeter, for example, has found that of all voters, those who watched television were the most likely to be influenced by the candidate's image. He accepted, however, that this may not be a reaction to the particular stimuli of televised politics although such a direct effect is plausible- as a more general increase in the importance of candidate factors resulting from various political change in which television has played a role (1987, p. 336)".*⁴¹ (Beberapa penelitian telah memperhatikan dari efek spesifik dari media yang berbeda. Scott Keeter, misalnya, telah menemukan bahwa dari semua pemilih, mereka yang menonton televisi adalah yang paling mungkin dipengaruhi oleh citra kandidat. Dia diterima, bagaimanapun, bahwa ini mungkin bukan reaksi terhadap rangsangan tertentu seperti politik televisi meskipun efek langsung adalah sangat masuk akal sebagai peningkatan yang lebih umum dalam pentingnya

³⁹ Ibid. Halaman 35.

⁴⁰ Ibid. Halaman 36.

⁴¹ Ibid

faktor calon yang dihasilkan dari berbagai perubahan politik di mana televisi telah memainkan perannya).

Berbeda dengan Brian McNair, Niffennger mempunyai pendapat lain bahwa proses *marketing* politik meliputi 4Ps yaitu *product* (produk), *promotion* (promosi), *price* (harga), dan *place* (tempat). Produk politik sendiri tidak hanya ditentukan oleh karakteristik produk itu sendiri, tetapi juga membutuhkan pemahaman pemilih untuk memaknai dan menginterpretasikan sebuah produk politik. Agar produk tadi dikenal oleh masyarakat maka perlu promosi. *Marketing* politik itu sendiri membahas bagaimana sebuah institusi politik dalam melakukan promosi produknya. Harga dalam *marketing* politik mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis sampai citra nasional. Harga ekonomi meliputi biaya kampanye. Harga psikologi mengacu pada persepsi psikologis masyarakat, sedangkan harga *image* nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa seorang kandidat dapat memberikan citra positif suatu bangsa negara dan dapat menjadi kebanggaan nasional atau tidak. *Place* (tempat) berkaitan dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih.⁴²

2.2.4. Candidate personality (personalitas kandidat)

Person atau citra kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan, yang berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih⁴³. *Personal image matters, for former Thatcher adviser Brendan Bruce, because its constituents clothes, hair, make-up, etc signify things about the politician. Image can, with*

⁴² Firmanzah. *Op Cit.* Halaman 199.

⁴³ Adman Nursal. *Op Cit.* Halaman 207.

skill, be enlisted to connote power, authority and other politically desirable attributes. (Menurut Bruce: pembangunan citra pribadi politikus dari latar belakang konstituen seperti pakaian, rambut, make up secara signifikan menandakan hal-hal yang berkaitan tentang politisi. Citra tersebut menentukan perolehan kekuatan, kewenangan, atau atribut politik yang diinginkan lainnya)⁴⁴.

Berdasarkan pendekatan rasional terutama yang berkaitan dengan orientasi utama pemilih yaitu dapat didasarkan atas orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi kandidat sendiri dapat didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olah raga, dan politik.

Menurut Adman kualitas figur dapat dilihat dari tiga dimensi:⁴⁵

1) Kualitas instrumental

Yaitu kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran obyektif tertentu. Kompetensi fungsional adalah keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas, misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, teknologi dan sebagainya. Kualitas instrumental merupakan sebuah keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melaksanakan tugasnya.

⁴⁴ Brian McNair. *Op Cit.* Halaman 148.

⁴⁵ Adman Nursal. *Op Cit.* Halaman 207.

2) Faktor simbolis

Kualitas kandidat juga meliputi faktor simbolis, antara lain:

- a) Prinsip-prinsip hidup meliputi sejumlah keyakinan atau nilai dasar yang dianut oleh seorang kandidat.
- b) Aura emosional adalah perasaan-perasaan emosional yang terpancar dari kandidat.
- c) Aura inspirasional adalah aspek-aspek tertentu yang terpancar dari kandidat yang membuat orang terinspirasi, termotivasi, tergerak untuk bersikap atau melakukan hal-hal tertentu.
- d) Aura sosial adalah representasi atau asosiasi terhadap kelompok sosial tertentu.

3) Fenotipe optis

Kualitas kandidat juga dipengaruhi oleh fenotipe optis yaitu penampakan visual seorang kandidat. Secara umum fenotipe optis ditentukan oleh tiga faktor:

- a) Pesona fisik adalah keindahan postur dan bentuk tubuh dan bagiannya.
- b) Faktor kesehatan dan kebugaran kandidat terpancar dari kekuatan fisik, *energetic*, aktif, *sportif*, riang, cerah dan sebagainya.
- c) Gaya penampilan meliputi cara dan pilihan pakaian dan bahasa tubuh yang terlihat dari kandidat.

Image politik didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik.

Ada beberapa hal terkait dengan strategi pembangunan *image* politik, antara lain:⁴⁶

- 1) Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membangun *image*. Publik membutuhkan rentang waktu yang panjang untuk dapat melihat kesesuaian pola dan alur politik.
- 2) Membangun *image* membutuhkan konsistensi dari semua hal yang dilakukan partai politik, seperti platform partai, program kerja, reputasi pemimpin partai, latar belakang partai dan retorika partai.
- 3) *Image* politik adalah kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan partai politik. Jadi, yang penting adalah persepsi publik. Partai politik harus mampu menempatkan kesan, citra dan reputasi politik mereka dalam benak masyarakat.
- 4) *Image* politik terdapat dalam kesadaran publik yang berasal dari memori kolektif masyarakat. Semua hal yang dilakukan partai politik tidak hilang begitu saja, melainkan akan terekam dalam ingatan publik, seperti laporan media massa yang dapat dilihat kembali, ingatan dalam sistem kognitif dan emosi dalam diri masing-masing individu, serta semua hal yang membekas secara fisik maupun non fisik mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh suatu partai politik.

⁴⁶ Firmanzah. 2008. *Op Cit.* Halaman 229.

Berbeda dengan Adman Nursal, Anwar Arifin lebih banyak menggunakan bahasa citra. Citra berasal dari bahasa Jawa, yang berarti gambar. Kemudian dikembangkan menjadi gambaran sebagai padanan perkataan *image* dalam bahasa Inggris. Citra merupakan kecenderungan yang tersusun dari pikiran, perasaan dan kemauan.⁴⁷ Sedangkan citra politik adalah suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik dan konsensus) yang memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya.⁴⁸

Dan Nimmo menjelaskan bahwa citra seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan, dan kesucian subyektif akan memberi kepuasan baginya dan memiliki paling sedikit tiga kegunaan. *Pertama*, memberi pemahaman tentang peristiwa politik. *Kedua*, kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. *Ketiga*, citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan diri dengan orang lain.⁴⁹

Citra politik dapat berkembang melalui proses pembelajaran politik atau sosialisasi politik yang terus menerus, melalui komunikasi politik baik yang berlangsung secara antarpersona, maupun yang berlangsung melalui media massa.⁵⁰ Karena citra politik itu terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka dapat memunculkan kesan yang positif dan juga negatif, dimana segala sesuatu itu pasti tidak ada yang sempurna.

⁴⁷ Dan Nimmo. 1999. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosdakarya. Halaman 6.

⁴⁸ Anwar Arifin. 2006. *Pencitraan Dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia. Halaman 2.

⁴⁹ Dan Nimmo. 1999. *Op Cit*. Halaman 6.

⁵⁰ Anwar Arifin. *Op Cit*. Halaman 5.

Hal-hal yang mempengaruhi baik buruknya citra antara lain:⁵¹

- a) Dinamika : pembahasan, orientasi tujuan dan pencari perhatian.
- b) Kerjasama : ramah, disukai, mampu untuk melayani.
- c) Bisnis: bijaksana, cerdas, persuasif, terorganisir.
- d) Karakter: beretika, reputasi yang dihormati.
- e) Sukses: penampilan keuangan, percaya diri.
- f) Penarikan mundur : penuh rahasia, kecurigaan.

2.2.5. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial

Sumber daya keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan.⁵² Sumber daya ekonomi merupakan hal esensial yang dapat melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk administrasi, peralatan kampanye dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat calon independen tidak mempunyai kendaraan politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu, faktor keuangan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung calon independen dalam Pemilu.

Faktor finansial ini akan meningkat saat menjelang periode kampanye pemilu yang menuntut pengeluaran dan belanja besar. Keterbatasan sumber daya keuangan dapat membatasi ruang gerak politik untuk menggalang basis dukungan. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan transparansi semakin tinggi, sehingga para

⁵¹ Dyah Pitaloka, dkk, "Audit Citra Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla". FORUM, Vol. 35, No. 2.Juni 2007. Halaman, 56.

⁵² Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman 140.

politisi dituntut untuk lebih kreatif dan sesuai dengan koridor hukum serta ketentuan yang berlaku.⁵³

Sumber daya ekonomi secara jelas menyebutkan bahwa faktor modal finansial memerankan peran penting, sedangkan sumber daya sosial salah satunya dapat berupa modal sosial.

Calon independen harus mempunyai modal sosial yang kuat misalnya rekam jejaknya bagus, punya prestasi dibidangnya, jaringannya luas, mempunyai jiwa sosial yang sudah terbukti, mempunyai dana, mempunyai visi misi dan program yang jelas untuk membawa perubahan ke arah yang positif jika ingin diterima oleh semua pihak. Menurut Francis Fukuyama bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai *sine qua non* bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Unsur penting dari *social contract* (kontrak sosial) ini antara lain yang disebut dengan jaringan sosial, pola-pola timbal balik, dan kewajiban bersama.⁵⁴

Kepekaan sosial, empati, kerjasama, koordinasi, diplomasi dan komunikasi sosial merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh politikus sehingga dengan kemampuan tersebut dapat melakukan kerjasama dan koordinasi sosial. Kerjasama dan koordinasi sosial dalam hal ini diartikan sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi dengan elemen-elemen seperti media masa, LSM, pemerintah, kepolisian, jurnalis dan sebagainya. Hubungan dengan mereka perlu dijaga untuk menjamin terbentuknya jaringan

⁵³ Ibid. Halaman 262.

⁵⁴ Ari Pradhanawati. 2010. *Demokrasi Sulit Diprediksi*. Semarang: JALANMATA. Halaman 57..

komunikasi dan koordinasi sosial. Berpolitik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan sangat membutuhkan dukungan dan *support* dari jaringan yang terbentuk. Semakin luas dan solid jaringannya, semakin mempermudah pula dalam berpolitik.⁵⁵

Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh kandidat adalah tentang fase-fase penting dalam memenangkan Pemilu. *Fase pertama* adalah fase peningkatan modal sosial. Fase ini dikenal juga dengan fase sosialisasi. Fase ini adalah fase dimana kandidat benar-benar terjun ke masyarakat. Kandidat banyak melakukan sosialisasi di masyarakat. Kandidat melakukan kerja-kerja sosial. Semakin lama fase ini dilalui oleh kandidat akan semakin kuat akar sosial kandidat di masyarakat. Semakin kuat modal sosial akan memperluas jaringan sosial kandidat di masyarakat. Besarnya modal sosial yang dipupuk oleh kandidat akan dapat menekan biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh kandidat. Bahkan pada tahap tertentu, justru pemilih yang akan secara suka rela mengeluarkan dana dan tenaga untuk mendukung kandidat. *Fase kedua* adalah fase meraih dukungan politik. Fase ini fase dimana kandidat berhasil mendapat dukungan dari partai politik. Kandidat memperoleh tiket pencalonan di KPU. Pada fase ini yang dibutuhkan adalah loby politik dan kekuatan finansial. Kedekatan dengan elit politik menjadi faktor penting. Hal ini penting untuk meyakinkan elit partai bahwa kandidat tersebut adalah orang yang punya potensi besar untuk memenangkan Pemilu. Kandidat juga harus meyakinkan elit partai bahwa kemenangan kandidat tersebut akan menguntungkan partai untuk kurun 5 tahun kedepan.

⁵⁵ Firmanzah. 2011. *Op Cit.* Halaman 260.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan tiket partai, kandidat juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. *Fase ketiga* adalah fase memobilisasi dukungan pemilih. Ini adalah fase atau babak final dari pertandingan Pemilukada. Kandidat dituntut untuk bagaimana menggerakkan mesin mobilisasi (jaringan sosial) dan mesin pencitraan (media komunikasi). Pengalaman dan strategi politik sangat diperlukan pada fase ini. Bila dipandang perlu, konsultan politik dapat diminta bantuannya untuk mendampingi.⁵⁶

2.2.6. *Party oriented voters* (pemilih yang berorientasi partai)

Party oriented voters dapat ditelaah dari *party identification*. *Party oriented voters* ini untuk melihat sejauh mana keterikatan antara masyarakat dengan partai, sehingga dapat dilihat hubungan keduanya dari sudut pandang psikologis-ideologis. Menurut Afan Gaffar, salah satu yang mempengaruhi perilaku memilih adalah *party identification*, yang menyebutkan bahwa *party identification* sangat bergantung pada persoalan psikologis-ideologis, yaitu sejauh mana seseorang merasa dekat dengan secara psikologis dengan partai atau kandidat tertentu, maka sejauh itu pulalah ia akan berhubungan dengan partai atau kandidat tersebut. Kelekatan psikologis-ideologis ini (*party identification*) dapat dibentuk melalui sosialisasi politik⁵⁷. Sosialisasi politik dalam konteks pemberian suara pada pasangan calon ketika Pemilukada berlangsung sangat dipengaruhi oleh keterikatan emosional pemilih terhadap pasangan calon serta partai pengusung calon. Kedekatan atau keterikatan individu pada pasangan calon serta partai pengusung calon, dalam ilmu politik dapat dibentuk melalui sosialisasi

⁵⁶ Dendi Susianto. Jumat 2 Desember 2011. <http://konsultan-politik.blogspot.com/2011/12/tiga-fase-penting-bagi-kandidat-pilkada.html>

⁵⁷ Leo Agustino. *Op Cit.* Halaman. 203.

politik (salah satunya yang paling dekat dengan hari pemilihan adalah kampanye). Karena itu sosialisasi politik dalam Pemilu pada mesti diartikan sebagai salah satu bagian dari proses sosialisasi nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana pasangan calon akan bekerja demi kemaslahatan anggota masyarakat dalam suatu sistem politiknya.⁵⁸

Berdasarkan pendekatan psikologis atau yang dikenal dengan Mazhab Michigan menyebutkan bahwa adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi, dimana sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan dapat dimulai sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi kepartaian. Berdasarkan teori identifikasi kepartaian ini, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Pemilih seolah-olah tidak terpengaruh oleh perubahan dunia sekitar. Hal ini oleh Dan Nimmo pemilih yang dipengaruhi oleh identifikasi partai digolongkan sebagai pemberi suara yang reaktif.⁵⁹

Selain karena faktor ideologis, *party identification* juga karena organisatoris, dimana partai politik merupakan mesin politik yang efektif karena mempunyai jenjang hierarki sampai pada tingkat desa. Salah satu fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan

⁵⁸ Ibid. Halaman 210.

⁵⁹ Adman Nursal. *Op Cit.* Halaman 59.

politik sebagai anggota partai. Selain itu juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama.⁶⁰

Menurut Bambang Cipto bahwa proses pengambilan keputusan pemilihan dapat diperkirakan menurut tolak ukur tradisional yang meliputi tiga aspek, yaitu:⁶¹

1) *Party identification*

Identifikasi partai merupakan perasaan terikat pada kelompok mana ia menjadi anggota ataupun kelompok yang dipilih, sebagaimana diungkapkan oleh Campbell, Gurin dan Millers: *the sense of personal attachment which the individual feels toward the (partisan) group of choice*. Selanjutnya, Millers dan Shank menyatakan identifikasi partai adalah *a concept...positing that one's sense of may include a feeling of personal identity with ...a political party*.

2) *Issues of candidate and party*

Isu-isu diseputar kandidat dari suatu partai maupun isu-isu diseputar partai tersebut.

3) *Candidate's (party elit's) personality, style, and performance.*

Faktor kepribadian, gaya hidup dan performa dari partai maupun kandidat akan mempengaruhi keputusan pemilihan.

⁶⁰ Miriam Budiardjo. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 164.

⁶¹ M. Khoirul Anwar dan Vina Salviana DS. 2006. *Perilaku Partai Politik*. Malang: UMM Press. Halaman 27.

Party oriented voters dapat dilihat dari identifikasi kepartaian yang telah terbentuk dimasyarakat. Membangun kedekatan partai dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah. *Party oriented voters* muncul berdasarkan kesamaan latar belakang ideologi dan adanya kedekatan secara psikologis. Jika *party oriented voters* telah terbentuk dalam suatu masyarakat maka akan sangat sulit untuk mengubah perilaku politik masyarakat, apalagi jika kandidat atau partai yang baru tidak mempunyai ideologi yang sama dengan ideologi yang telah tertanam dalam benak masyarakat.

2.3. Operasionalisasi Konsep

Calon independen tidak mempunyai basis massa dan ideologi yang kuat karena tidak didukung oleh partai politik, sehingga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan ini dilihat dari 3 faktor utama yaitu:

- 1) *Candidate personality* (personalitas kandidat): dilihat dari profil masing-masing calon, visi-misi dan program kerja yang ditawarkan.
- 2) Sumber daya: sumber daya ekonomi dan sosial.
- 3) *Party oriented voters* yaitu keterikatan pemilih secara psikologis-ideologis terhadap partai tertentu sehingga pemilih tidak mudah untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon independen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan ataupun menganalisa data dengan perantara alat tertentu untuk mencapai tujuan, metode yang digunakan sebagai berikut:

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁶²

Data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya sebagai penunjang dari penelitian ini.⁶³

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pati. PemiluKada di Kabupaten Pati menarik untuk diteliti dikarenakan PemiluKada yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi serta ada tiga pasangan calon independen yang berani tampil dan bertarung dalam PemiluKada Kabupaten Pati tahun 2011 yang merupakan pertama kalinya pasangan dari jalur independen tampil sepanjang sejarah PemiluKada Kabupaten Pati.

⁶² Nawawi Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 139

⁶³ Lexi J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 12.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis:

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan khusus, seperti data-data yang dihimpun dari informan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, sehingga pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih menekankan pengumpulan data melalui:

- a) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penelitian yang dilaksanakan.

- b) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari sumber non manusia seperti halnya laporan, buku catatan, dokumen atau naskah serta sumber lain. Data yang diharapkan dari metode ini adalah mengenai calon independen dalam Pemiluakada.

3.5. Metode Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sample*⁶⁴ yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan atas tujuan tertentu. Dalam hal penelitian ini sampel yang akan diteliti adalah:

- a) Pasangan calon kepala daerah dari jalur independen dalam Pemiluakada Kabupaten Pati tahun 2011 dan tim suksesnya. Ketiga pasangan calon independen yaitu Slamet Warsito-Sri Mulyani, Sri Merditomo-Karsidi, Sri Susahid-Hasan, sedangkan tim suksesnya antara lain Totok, Mahmud.
- b) Anggota KPU sebagai pihak penyelenggara Pemiluakada Kabupaten Pati yaitu Bapak Hendro.
- c) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah calon independen yaitu K. H. Marham Adib. Ketua Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati.

Selain itu juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Karena

⁶⁴ Ibid. Halaman 36.

hanya wawancara dengan orang-orang tersebut diatas saja tidak cukup, maka perlu mencari orang lain yang dianggap tahu dan dapat melengkapi data, yaitu Yusuf Rahmad Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Undip dan Emil Eifqi Sekretariat DPC PPP Kabupaten Pati.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam analisa data adalah menelaah seluruh data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang tersedia yaitu laporan-laporan, dokumen-dokumen, dan hasil dari wawancara.

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif . Menurut Bogdan dan Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.⁶⁵

3.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika dalam beberapa bab yang akan mempermudah dalam mengetahui isi dari uraian-uraian didalamnya. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian serta kegunaan penelitian.

⁶⁵ Ibid. Halaman 248.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang Pemiluakada, calon independen dan hal-hal yang berhubungan dengan calon independen seperti *candidate personality*, sumber daya sosial ekonomi serta *party oriented voters*. Dalam bab dua juga diuraikan mengenai operasionalisasi konsep.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode penentuan informan, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Memuat deskripsi penelitian baik tempat maupun subyek penelitian, dan memuat hasil penelitian serta pembahasan mengenai analisa data masing-masing variabel.

BAB V PENUTUP

Penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan pada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Novel. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anwar, M. Khoirul dan DS, Vina Salviana. (2006). *Perilaku Partai Politik*. Malang: UMM Press.
- Arifin, Anwar. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Anwar. (2006). *Pencitraan Dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Asfar, Muhammad. (2006). *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danial, Akhmad. (2009). *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Ellwein, Warsito, Sigit Pranawa, Yan Kurniawan, Eko Bambang Subiantoro. (2010). *Memperbesar Peluang Calon Memenangkan Pilkada: Profil Calon, Mesin Pemenangan dan Perilaku Pemilih*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. (1992). *Javanese Voters*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- _____. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, Rochajat dan Sumarno. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung: Mandar Maju,
- Ibrahim, Herman dan Siagian, Faisal. (1999). *Kampanye Tanpa Kekerasan pada Pemilu*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Depdagri.
- John, Field. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnaedi. (2009). *Memenangkan Pemilu dengan Pemasaran Efektif: Trik-trik untuk Menghipnotis Pemilih*. Jakarta: Duta Media Tama.
- Mahendra, Oka. A.A. (2005). *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Jakarta: Millennium Publisher.
- McNair, Brian. (2003). *An Introduction To Political Communication*. New York: Routledge.
- Moleong, Lexi J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saiful. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (1999). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosdakarya.
- _____. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah (cet.3)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nursal, Adman. (2004). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Pradhanawati, Ari. (2010). *Demokrasi Sulit Diprediksi*. Semarang: JALANMATA.
- _____. (2008). *Manajemen Politik: Edisi Pemilu 1955-2004 sampai Pilgub dan Pilkada 2005-2008*. Semarang: JALANMATA.
- Pradhanawati, Ari dan Utomo, Tri Cahya. (2008). *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: FISIP UNDIP dan JALANMATA.
- Prihatmoko, Joko P. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu: dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi, dan Nasrun, Mappa. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Riswandi. (2009). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rochayat Harun dan Sumarno. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Saiful Muhtadi, Asep. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam PolitimPasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanit, Arbi. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Kastabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (cet.15). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. (2008). *Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung*. Yogyakarta: Bukulaela.
- Schroder, Peter. 2008. *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Singaribun, Masri dan Efendi, Sofyan. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Steven J Rosenstone and John Mark Hansen. 1993. *Mobilization, Participation and Democracy in America*. Macmillan Publishing Company.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Venus, Antar. (2004). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Wasesa, Silih Agung. (2011). *Political Branding and Public Relation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiratmoko, Nick T, DS, Pradjarta dkk. (2004). *Yang Pusat dan Yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*. Salatiga: Pustaka Percik.

JURNAL:

EP, Apriatni. (2008). Etika Terapan dalam Kampanye Pilkada. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 18-22.

Fitriyah. (2011). *Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan Untuk Pilkada Langsung Berkualitas*". **POLITIKA**, No 1. Vol. 2 (April) 40-47.

Gono, Joyo Nur Suryanto. (2008). *Kampanye Politik dan Pencitraan dalam Pilkada Jateng*. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 23-28.

Hasfi, Nurul. (2008). *Televisi Lokal dan Kampanye Terselubung Cagub-Cawagub Pilkada Jateng 2008*. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 12-17.

Herieningsih, Sri Widowati. (2008). *Komunikasi Politik dan Etika Komunikasi dalam Kampanye Pilkada*. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 5-11.

Pitaloka, Dyah, Agus Naryoso, Bayu Vita Al Hayuantana. (2007). *Audit Citra Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla*. **FORUM**, No. 2. Vol. 35 (Juni): 55-59.

Pradhanawati, Ari. (2008). *Pilgub Jawa Tengah 2008 Berpacu dengan Undang-Undang*. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 58-64.

Kushandajani. (2008). *Pilkada dan Demokratisasi di Daerah*. **FORUM**, No.2. Vol. 36 (Juni) 1-4.

LAIN-LAIN:

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 12 Tahun 2008 atas Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Eko, Sutoro. *Pilkada secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi*, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004.

Muharini, Dyah. (2009). *Marketing Politik Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Penelitian pada PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode 2008-2013*. Tesis. Semarang: UNDIP.

Zubaidah, Siti. 2010. *Strategi Pemenangan Pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008*. Tesis. Semarang: UNDIP.

Mardiyanto. *Otonomi Daerah Problem dan Solusi Satu Tinjauan dan Pemikiran*. Seminar di Magister Ilmu Politik UNDIP Semarang (3 Mei 2012).

Berindra, Susie dan A Tomy Trinugroho. (2010, 23 Desember). *Sistem Pemilu Masih Mencari Bentuk*. **Kompas**: 8.

Berindra, Susie. (2010, 1 April). *Beramai-ramai Menjual Ide dan Tokoh*. **Kompas**: 4.

Kharis, M. Naiful. (2012, 5 Mei). *Memahami Demokrasi Pati*. **Suara Merdeka**: 7.

Sunarwi. (2011, 15 September). *Gugat DPP PDIP*. **Suara Merdeka**: 11.

Pramono, Sidik. (2012, 20 Maret). *Dana Kampanye: Menimbang Konsekuensi Pilihan Sistem Pemilu*. **Suara Merdeka**: 5.

Yuwono, Teguh. (2012, 30 Januari). *Pertarungan Ideologi Vs Pragmatisme Politik*. **Suara Merdeka**: 1.

Pati Dalam Angka 2011. (2011). Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2006 KPU Kabupaten Pati. Pati: KPU Kabupaten Pati

Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Pati: KPU Kabupaten Pati

Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Pati: KPU Kabupaten Pati

Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas SK Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Pati: KPU Kabupaten Pati

Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. Pati: KPU Kabupaten Pati

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/67441>

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/82042>. Sabtu, 28 Januari 2012. 06:30:40 WIB

kpu-jatengprov.go.id. di akses tanggal 23 Desember 2011.

<http://www.bezide.co.cc/2011/03/makalah-ilmu-politik-bersatunya-politik-html>, diakses 8 April 2011.

Dendi Susianto. Jumat 2 Desember 2011. <http://konsultan-politik.blogspot.com/2011/12/tiga-fase-penting-bagi-kandidat-pilkada.html>

Riana Afifah dan Agus Mulyadi, Rabu, 20 Juli 2011. 15:35 WIB. <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.Independen.Angin.Segar>

Rexona Ari. 27 Juni 2011. 04:27. <http://pilkada2011.blogspot.com/2011/06/konflik-internal-pdip-siapa-diuntungkan.html>